

BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Umum PT Kereta Api Indonesia (Persero)

Kehadiran kereta api di Indonesia ditandai dengan pencangkulan pertama pembangunan jalan kereta api di desa Kemijen, pada hari Jumat, tanggal 17 Juni 1864, kereta api pertama di Indonesia lahir. Pembangunan diprakarsai oleh *Nederlands-Indische Spoorweg Maatschappij* (NIS) dengan rute Kemijen-Tanggung. Pencangkulan tanah pertama dilakukan di Desa Kemijen dan diresmikan oleh Mr. L.A.J.W. Baron Sloet van de Beele. Namun jalur ini dibuka tiga tahun berikutnya pada 10 Agustus 1867, kemudian pada tahun 1873 tiga kota di Jawa Tengah, yaitu Semarang, Solo, dan Yogyakarta sudah berhasil dihubungkan.

Masa politik kolonial liberal rupanya mengakibatkan Pemerintah Belanda enggan mendirikan perusahaannya dan justru memberikan kesempatan luas bagi perusahaan-perusahaan kereta api swasta. Namun sayangnya, perusahaan swasta itu tidak memberikan keuntungan, terlebih lagi NIS masih membutuhkan bantuan keuangan dari Pemerintah Kolonial, maka Departemen Urusan Koloni mendirikan operator kereta api lain, *Staatsspoorwegen*, yang membentang dari *Buitenzorg* hingga Surabaya. Pertama dibangun di kedua ujungnya, jalur pertama di Surabaya dibuka pada tanggal 16 Mei 1878 dan terhubung pada tahun 1894. Selain itu, muncul juga lima belas operator kereta api swasta di Jawa yang menamakan dirinya sebagai "Perusahaan Trem Uap", namun meskipun namanya demikian, perusahaan itu sudah dapat dianggap sebagai operator kereta api regional.

Sebagai perusahaan kolonial, sebagian besar jalur kereta api di Indonesia mempunyai dua tujuan: ekonomis dan strategis. Nyatanya, syarat bantuan keuangan NIS antara lain membangun rel keretaapi ke Ambarawa, yang memiliki benteng bernama Willem I (yang diambil dari nama Raja Belanda). Jalur kereta api negara

pertama dibangun melalui pegunungan selatan Jawa, selain daerah datar di wilayah utara Jawa, untuk alasan strategis sama. Jalur kereta api negara di Jawa menghubungkan Anyer (lintas barat) menuju Banyuwangi (lintas timur).

Selain di Jawa, pembangunan rel kereta api juga dilakukan di Aceh, menghubungkan Banda Aceh hingga Pelabuhan Uleelhee, dengan lebar sepur 1.067 mm, yang digunakan untuk keperluan militer. Kemudian, lebar sepur yang sebelumnya 1.067 mm kemudian diganti menjadi 750 mm membentang ke selatan. Jalur ini kemudian berpindah kepemilikan dari Departemen Urusan Perang kepada Departemen Urusan Koloni tanggal 1 Januari 1916 menyusul perdamaian relatif di Aceh. Ada pula jalur kereta api di Ranah Minangkabau yang dibangun pada tahun 1891-1894 dan Sumatera Selatan yang dibangun tahun 1914-1932. Kedua jalur ini digunakan untuk layanan kereta api batu bara dari pertambangan bawah tanah menuju pelabuhan. Di Sumatera Utara, ada perusahaan kereta api bernama *Deli Spoorweg Maatschappij* yang banyak mengangkut karet dan tembakau di daerah Deli.

Pembangunan jalur kereta api juga diluncurkan di Sulawesi Selatan pada bulan Juli 1922 hingga 1930; sebagai bagian dari proyek besar-besaran pembangunan jalur rel di Kalimantan dan Sulawesi, menggabungkan sistem rel kereta api di Sumatera, serta elektrifikasi jalur kereta api utama di Jawa. Namun depresi besar telah membatalkan upaya ini. Meskipun tidak sempat dibangun, studi pembangunan jalur kereta api di Kalimantan, Bali, dan Lombok telah selesai dilakukan. Semasa pendudukan Jepang, seluruh jalur kereta api bahkan yang terpisah sekali pun dikelola sebagai satu kesatuan. Sementara itu, di Sumatera, juga dikelola oleh cabang-cabang Angkatan Bersenjata Kekaisaran Jepang, secara terpisah. Saat Pendudukan Jepang akhirnya mengubah lebar sepur 1.435 mm di Jawa menjadi 1.067 mm, sebagai penyelesaian masalah lebar sepur ganda. Ini bukanlah "permasalahan nyata" karena tidak banyak perubahan materiil di kedua sistem itu, banyak rel 1.435 mm dipasang rel ketiga pada tahun 1940, menghasilkan rel dengan lebar sepur campuran.

Setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dikumandangkan pada tanggal 17 Agustus 1945, karyawan perusahaan kereta api yang tergabung dalam Angkatan Moeda Kereta Api (AMKA) mengambil alih kekuasaan perkeretaapian dari Jepang. Pada tanggal 28 September 1945, pembacaan pernyataan sikap oleh Ismangil dan sejumlah anggota AMKA lainnya menegaskan bahwa mulai hari itu kekuasaan perkeretaapian berada di tangan bangsa Indonesia sehingga Jepang sudah tidak berhak untuk mencampuri urusan perkeretaapian di Indonesia. Inilah yang melandasi ditetapkannya tanggal 28 September 1945 sebagai Hari Kereta Api serta dibentuknya Djawatan Kereta Api Repoeblik Indonesia (DKARI). Kecuali DKA, ada operator KA lain yaitu Kereta Api Soematra Oetara Negara Repoeblik Indonesia dan Kereta Api Negara Repoeblik Indonesia (1953-1960), yang semuanya beroperasi di Sumatera.

Nama DKA pun berubah menjadi Perusahaan Negara Kereta Api (PNKA) (1960-1970), semasa Orde Lama. Lalu, pada tanggal 28 September 1970 berubah menjadi Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA, Perjanka) (1970-1989). Kemudian, pada tanggal 28 September 1989, PJKA berubah menjadi Perusahaan Umum Kereta Api (Perumka) (1989-1995), dan semenjak tanggal 12 Agustus 1995, Perumka mulai menunjukkan keterbukaannya dan berubah menjadi PT Kereta Api (Persero) (PT KA) (1995-2010). Pada bulan 20 Mei 2010, nama PT Kereta Api berubah menjadi PT Kereta Api Indonesia (Persero) (KAI) (2010-saat ini), hingga saat ini. adapun perkembangan PT Kereta Api Indonesia dari mulai berdiri hingga sekarang menjadi bentuk persero dapat dilihat dari Tabel 2.1 di bawah ini.

**Tabel 2.1 Sejarah Perkembangan dan Dasar Hukum PT Kereta Api
Indonesia (Persero)**

sumber: PT Kereta Api Indonesia (Persero), 2016

Periode	Status	Dasar Hukum
Th. 1864	Pertama kali dibangun Jalan Rel sepanjang 26 km antara Kemijen Tanggung oleh Pemerintah Hindia Belanda	
1864 s.d 1945	<i>Staat Spoorwegen (SS) Verenigde Spoorwegenbedrijf (VS) Deli Spoorwegen Maatschappij (DSM)</i>	IBW
1945 s.d 1950	DKA	IBW
1950 s.d 1963	DKA - RI	IBW
1963 s.d 1971	PNKA	PP. No. 22 Th. 1963
1971 s.d.1991	PJKA	PP. No. 61 Th. 1971
1991 s.d 1998	PERUMKA	PP. No. 57 Th. 1990
1998 s.d. 2010	PT. KERETA API (Persero)	PP. No. 19 Th. 1998 Keppres No. 39 Th. 1999 Akte Notaris Imas Fatimah
Mei 2010 s.d sekarang	PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO)	Instruksi Direksi No. 16/OT.203/KA 2010

2.2 Arti dan Makna Logo PT Kereta Api Indonesia (Persero)

Logo merupakan suatu gambar atau sekadar sketsa dengan arti tertentu, yang mana memiliki suatu arti atau menggambarkan sebuah perusahaan, daerah, organisasi, produk, negara, lembaga, dan hal lainnya yang membutuhkan sesuatu yang singkat dan mudah diingat sebagai pengganti dari nama sebenarnya. Adapun logo yang dimiliki oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang dapat dilihat pada Gambar 2.1. di bawah ini.



Gambar 2.1. Logo PT Kereta Api Indonesia (Persero)

Sumber: PT Kereta Api Indonesia (Persero), 2016

Berdasarkan bentuk dari logo yang dimiliki oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero), dapat dijelaskan arti dan makna yang terdapat didalamnya, yaitu :

- a. Garis melengkung melambangkan gerakan yang dinamis PT KAI dalam mencapai Visi dan Misinya.
- b. Anak Panah melambangkan Nilai Integritas, yang harus dimiliki insan PT KAI dalam mewujudkan Pelayanan Prima.

Sedangkan untuk makna dari warna yang terdapat dalam logo PT Kereta Api Indonesia (Persero), yaitu :

- a. Warna Orange melambangkan proses Pelayanan Prima (Kepuasan Pelanggan) yang ditujukan kepada pelanggan internal dan eksternal.
- b. Warna Biru melambangkan semangat Inovasi yang harus dilakukan dalam memberikan nilai tambah ke *stakeholders*. Inovasi dilakukan dengan semangat

sinergi di semua bidang dan dimulai dari hal yang paling kecil sehingga dapat melesat.

2.3 Visi dan Misi PT Kereta Api Indonesia (Persero)

2.3.1 Visi PT Kereta Api Indonesia (Persero)

“Menjadi penyedia jasa perkeretaapian terbaik yang fokus pada pelayanan pelanggan dan memenuhi harapan *stakeholders*.” Dalam hal ini menekankan kepada :

- a. Seluruh lapisan masyarakat adalah pelanggan
- b. Mengutamakan keselamatan dan keandalan
- c. Pelopor pembangunan yang berwawasan lingkungan
- d. Karyawan bangga dan sejahtera
- e. Keuangan perusahaan yang sehat

2.3.2 Misi PT Kereta Api Indonesia (Persero)

“Menyelenggarakan bisnis perkeretaapian dan bisnis usaha penunjangnya, melalui praktek bisnis dan model organisasi terbaik untuk memberikan nilai tambah yang tinggi bagi *stakeholders* dan kelestarian lingkungan berdasarkan 4 pilar utama : Keselamatan, Ketepatan waktu, Pelayanan dan Kenyamanan.”

2.4 Nilai Budaya PT Kereta Api Indonesia (Persero)



Gambar 2.2 Nilai Budaya PT Kereta Api Indonesia (Persero)

Sumber: PT Kereta Api Indonesia (Persero), 2016

Adapun budaya atau yang disebut juga dengan Nilai Utama perusahaan, yang mana merupakan sama halnya dengan prinsip-prinsip kerja yang dimiliki sebuah perusahaan. Berikut ini adalah 5 (lima) Nilai Utama yang dimiliki oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero), antara lain:

1. Integritas (*Integrity*)

Kami insan PT Kereta Api Indonesia (Persero) bertindak konsisten sesuai dengan nilai-nilai kebijakan organisasi dan kode etik perusahaan. Memiliki pemahaman dan keinginan untuk menyesuaikan diri dengan kebijakan dan etika tersebut dan bertindak secara konsisten walaupun sulit untuk melakukannya.

2. Profesional (*Professional*)

Kami insan PT Kereta Api Indonesia (Persero) memiliki kemampuan dan penguasaan dalam bidang pengetahuan yang terkait dengan pekerjaan, mampu menguasai untuk menggunakan, mengembangkan, membagikan pengetahuan yang terkait dengan pekerjaan kepada orang lain.

3. Keselamatan (*Safety*)

Kami insan PT Kereta Api Indonesia (Persero) memiliki sifat tanpa kompromi dan konsisten dalam menjalankan atau menciptakan sistem atau proses kerja yang mempunyai potensi resiko yang rendah terhadap terjadinya kecelakaan dan menjaga aset perusahaan dari kemungkinan terjadinya kerugian.

4. Inovasi (*Innovation*)

Kami insan PT Kereta Api Indonesia (Persero) selalu menumbuh kembangkan gagasan baru, melakukan tindakan perbaikan yang berkelanjutan dan menciptakan lingkungan kondusif untuk berkreasi sehingga memberikan nilai tambah bagi *stakeholder*.

5. Pelayanan Prima (*Excellent Service*)

Kami insan PT Kereta Api Indonesia (Persero) akan memberikan pelayanan yang terbaik yang sesuai dengan standar mutu yang memuaskan dan sesuai harapan atau melebihi harapan pelanggan dengan memenuhi 6 A unsur pokok: *Ability* (Kemampuan), *Attitude* (Sikap), *Appearance* (Penampilan), *Attention* (Perhatian), *Action* (Tindakan), dan *Accountability* (Tanggung jawab)

2.5 Bidang Usaha PT Kereta Api Indonesia (Persero)

PT. Kereta Api Indonesia menjalankan usahanya dibidang bisnis perkeretaapian dan bisnis usaha penunjangnya yang fokus pada pelayanan pelanggan dan memenuhi harapan *stakeholders*, meliputi :

2.5.1 Pelayanan Penumpang

Sebagai perusahaan yang mengelola perkeretaapian di Indonesia, PT. Kereta Api Indonesia (Persero) telah banyak mengoperasikan kereta penumpangnya, baik kereta api Utama (Komersil dan Non Komersil), maupun kereta api lokal di Jawa dan Sumatera, yang terdiri dari :

- a. Kereta Api Eksekutif
- b. Kereta Api Ekonomi AC
- c. Kereta Api Bisnis
- d. Kereta Api Campuran
- e. Kereta Api Lokal
- f. Kereta Rel Listrik (KRL)

2.5.2 Angkutan Barang

Komoditi yang dapat dilayani pada angkutan barang, di antaranya :

a. Petikemas

Paletisasi, Insulated and refrigerated containers, Standard containers, Hard-top containers, Open-top containers, Flatracks, Platforms (plats), Ventilated containers, Bulk containers, Tank containers.

b. Barang Curah Cair/ *Liquid*

Bahan Bakar Minyak (BBM) , *Crude Palm Oil (CPO)*, Semua bahan kimia cair yang tidak korosif, Minyak goreng, air mineral dan lain-lain.

c. Barang Curah

Batu bara, pasir, semen, gula pasir, pupuk, beras, kricak, aspal, klinker dan lain-lain.

d. Barang Retail

Barang elektronik, hasil produksi pabrik yang sudah terpaket, barang kiriman hantaran, barang potongan.

e. Barang Packaging

Semen, pupuk, gula pasir, beras, paletisasi.

2.5.3 Pengusahaan Aset

Untuk melakukan sewa aset PT. Kereta Api Indonesia (Persero) anda mengikuti prosedur sewa sebagai berikut :

a. Aset yang dapat disewa terdiri dari *Asset Railway* dan *Asset Non Railway*.

b. Mengajukan permohonan sewa ke Manager komersial di daerah operasi terdekat.

c. Menunjukkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB (SPPT PBB) terbaru.

d. Melakukan Pertemuan untuk Pembahasan rencana sewa-menyewa, Penentuan tarif dan Kesepakatan kerjasama.

e. Peninjauan lokasi bersama.proses kontrak.

f. Penandatanganan kontrak kerjasama.

2.6 Wilayah Kerja PT Kereta Api Indonesia (Persero)

Wilayah kerja PT Kereta Api Indonesia (Persero) meliputi beberapa daerah yang di Indonesia, di antaranya terbagi menjadi dua wilayah operasi yaitu di pulau Jawa dan Sumatra. Wilayah operasi di pulau Jawa antara lain:

- a. Daerah Operasi I Jakarta, berada di Jalan Cikini Raya.
- b. Daerah Operasi II Bandung, berada di Jalan Stasiun Selatan No. 25 Bandung.
- c. Daerah Operasi III Cirebon, berada di Jalan Siliwangi Nomor 82.
- d. Daerah Operasi IV Semarang, berada di Jalan M.H. Thamrin No.3 Semarang.
- e. Daerah Operasi V Purwokerto, berada di Jalan Stasiun Raya Purwokerto.
- f. Daerah Operasi VI Yogyakarta, berada di Jalan Lempuyangan No. 1.
- g. Daerah Operasi VII Madiun, berada di Jalan Kopol Sunaryo.
- h. Daerah Operasi VIII Surabaya, berada di Jalan Gubeng Masjid.
- i. Daerah Operasi IX Jember, berada di Jalan Dahlia 2.

Sedangkan untuk wilayah operasi yang berlokasi di pulau Sumatra meliputi:

- a. Divisi regional 1 yaitu Sumatera Utara
- b. Divisi regional 2 yaitu Sumatera Barat
- c. Divisi regional 3 yaitu Sumatera Selatan dan Lampung

2.7 Struktur Organisasi Unit Keuangan PT Kereta Api Indonesia (Persero)

Daerah Operasi 4 Semarang

Struktur organisasi yang ada pada PT Kereta Api Indonesia (Persero), terbagi menjadi beberapa unit yang fungsi dan wewenangnya berbeda disetiap divisi dan daerah pengopeasiannya. Struktur organisasi ini, diperlukan guna mempertegas pembagian tugas dan wewenang yang menjadi tanggung jawab dari setiap orang yang terlibat didalamnya, sehingga terjalin kerjasama dan memperoleh hasil kerja yang optimal. Dalam struktur organisasinya, terdiri satu manajemen organisasi

yang memiliki wewenang dalam pemberian tugas dan tanggung jawab, mulai dari direksi yang kemudian bergerak kebawah secara vertical.

PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi IV Semarang dipimpin oleh Kepala Daerah Operasi (KADAOP) dibantu oleh *Deputy Executive Vice President* (DEVP) dan *Executive Vice President* (EVP) dan memiliki 16 unit dalam mendukung kinerjanya. Di mana setiap unit kerja dipimpin oleh seorang *Manager* dan di bantu oleh *Assistant Manager* (kecuali unit hukum). 16 unit kerja tersebut yaitu:

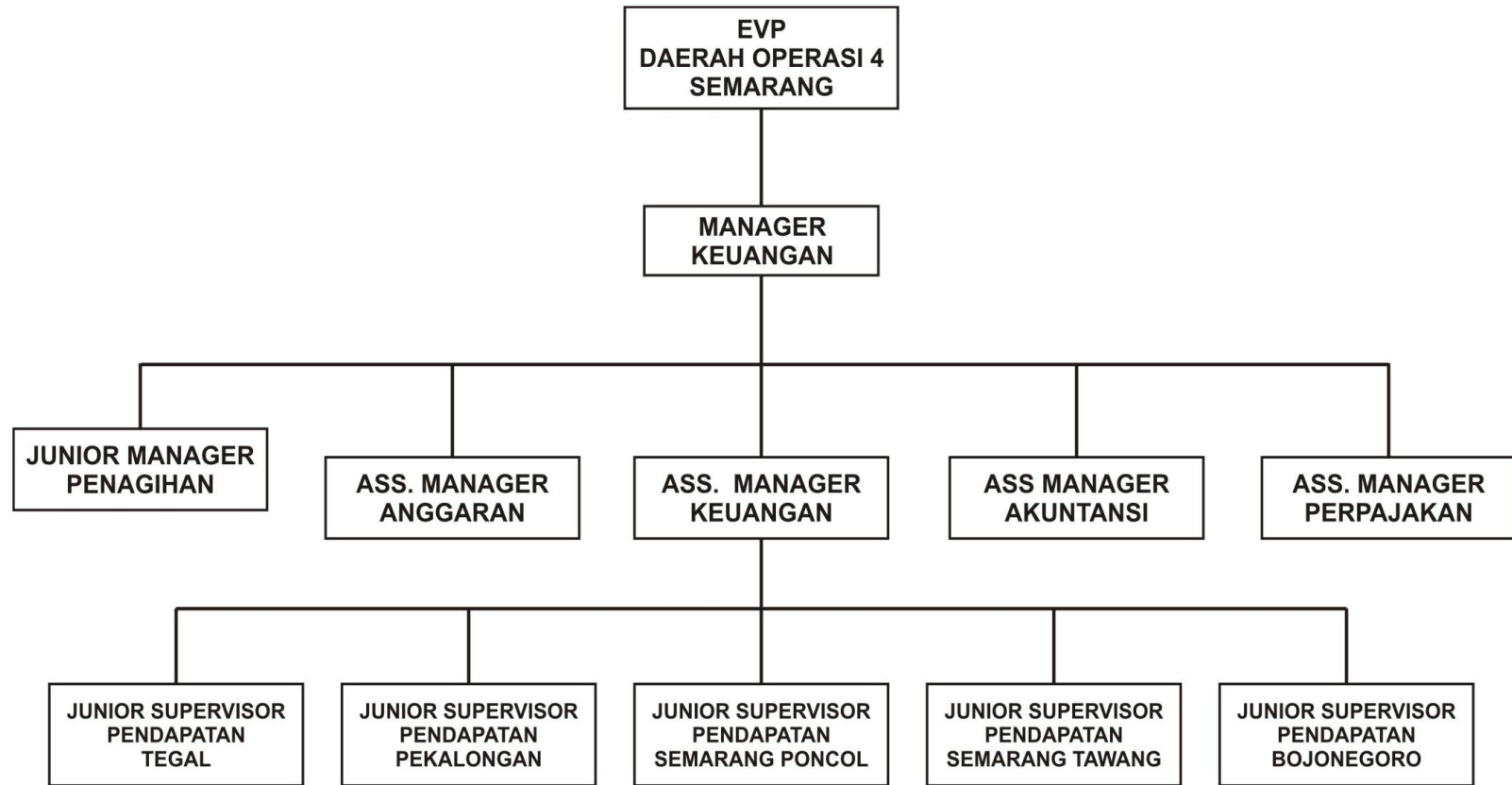
- a. Unit Pelayanan
- b. Unit Hukum
- c. Unit Komersial
- d. Unit Hubungan Masyarakat
- e. Unit Operasi
- f. Unit Keuangan
- g. Unit Jalan dan Jembatan (JJ)
- h. Unit Pengadaan Aset
- i. Unit Sintelis
- j. Unit Sistem Informasi (IT)
- k. Unit Sarana
- l. Unit SDM dan Umum
- m. Unit Pengamanan
- n. Unit Asset
- o. Unit Kesehatan
- p. Unit Pengadaan Barang dan Jasa

Berdasarkan Keputusan Direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero) nomor: KEP.U/OT.003/XII/6/KA-2014, mengenai Organisasi dan Tata Laksana Seksi Keuangan & SDM, Serta Seksi Keuangan, SDM & Teknologi Informasi pada Daerah Operasi, Divisi Regional, Sub Divisi Regional dan Balai Yasa di

Lingkungan PT Kereta Api Indonesia (Persero), seksi Keuangan Daerah Operasi 4 Semarang dipimpin oleh seorang manager yang berada dan bertanggung jawab kepada *Executive Vice President* (EVP) Daerah Operasi 4 Semarang. Adapun susunan organisasi seksi keuangan PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 4 Semarang, yaitu:

1. *Executive Vice President* (EVP),
2. *Manager* Keuangan,
3. *Junior Manager* Penagihan,
4. *Assistant Manager* Anggaran
5. *Assistant Manager* Keuangan
6. *Assistant Manager* Akuntansi
7. *Assistant Manager* Pajak
8. *Junior Supervisor* Pendapatan Tegal
9. *Junior Supervisor* Pendapatan Pekalongan
10. *Junior Supervisor* Pendapatan Semarang Poncol
11. *Junior Supervisor* Pendapatan Semarang Tawang
12. *Junior Supervisor* Pendapatan Bojonegoro

Gambar Struktur Organisasi Seksi Keuangan PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 4 Semarang dapat dilihat pada Gambar 2.3 di bawah ini.



Gambar 2.3 Struktur Organisasi Unit Keuangan PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 4 Semarang

Sumber: PT Kereta Api Indonesia (Persero), 2016

2.8 Tugas dan Tanggung Jawab Unit Keuangan PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 4 Semarang

Tugas dan tanggung jawab dibuat dengan harapan tidak terjadi kerancuan, baik kerancuan tugas dan wewenang maupun tanggung jawab dari setiap personil dalam organisasi. Seseorang yang memegang jabatan sebagai atasan tidak bertindak sewenang-wenang, sebaliknya pihak bawahan harus bertanggung jawab atas pekerjaannya. Berikut ini merupakan uraian dari tugas dan tanggung jawab dari masing – masing bagian dalam unit keuangan PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 4 Semarang, antara lain:

1. Manager Keuangan

Manager Keuangan Daerah Operasi 4 Semarang mempunyai tugas pokok dan tanggung jawab antara lain:

- a. Merumuskan penjabaran strategi dan kebijakan yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya yang telah ditetapkan oleh Kantor Pusat, di wilayah Daerah Operasi 4 Semarang.
- b. Terselenggaranya proses peningkatan kualitas (*Quality Improvement*) secara berkelanjutan serta pengelolaan resiko di seksinya.
- c. Mengkoordinir penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahunan Daerah Operasi 4 Semarang dan melaksanakan, mengendalikan dan melaporkan rencana serta pelaksanaan anggaran.
- d. Pelaksanaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan Daerah Operasi 4 Semarangserta pembinaannya.
- e. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, pengesahan pembayaran non gaji pegawai, pengesahan pembayaran kepada pihak ketiga serta penyelesaian dokumen analisa dan tata usaha keuangan serta administrasi pelaksanaan *petty cash*.

- f. Melaksanakan Administrasi Perpajakan.
- g. Melaksanakan penagihan atas piutang Angkutan Penumpang, Angkutan Barang dan Penggunaan Aset (Rekening G 215/SAB) serta Tatat Usaha Administrasi Piutang (*Aging Schedule*).

Dalam menjalankan tugas pokok dan tanggung jawabnya, Manager Keuangan Daerah Operasi 4 Semarang dibantu oleh:

- a. *Junior Manager* Penagihan, yang mempunyai tugas pokok dan tanggung jawab melaksanakan penagihan atas Piutang Angkutan Penumpang, Angkutan Barang dan Penggunaan Aset (Rekening G.215/SAB) serta Tata Usaha Administrasi Piutang (*Aging Schedule*).
- b. *Assistant Manager* Anggaran yang mempunyai tugas pokok dan tanggung jawab mengkoordinasi penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahunan Daerah Operasi, melaksanakan, mengendalikan dan melaporkan rencana serta pelaksanaan anggaran.
- c. *Assistant Manager* Akunansi, yang mempunyai tugas pokok dan tanggung jawab melaksanakan pengelolaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan Daerah Operasi.
- d. *Assistant Manager* Keuangan, yang mempunyai tugas pokok dan tanggung jawab melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, pengesahaan pembayaran non gaji pegawai, pengesahaan pembayaran kepada pihak ketiga, serta penyelesaian dokumen analisa dan tata usaha keuangan administrasi pelaksanaan petty cash serta melaksanakan tata laksana dan tata usaha perbendaharaan Daerah Operasi 4 Semarang.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawabnya, *Assistant Manager* Keuangan dibantu oleh beberapa *Junior Supervisor* Pendapatan yang bertanggung jawab atas pengelolaan pendapatan angkutan penumpang maupun barang di Stasiun tempat kedudukan serta Stasiun Rayon, meliputi kegiatan verifikasi penerimaan kas dari pendapatan, penyetoran dan pencatatannya;

e. Tempat kedudukan *Junior Supervisor* Pendapatan dan Stasiun Rayon, ditetapkan sebagai berikut;

1) *Junior Supervisor* Pendapatan Stasiun Semarang Tawang, mengelola pendapatan Stasiun Semarang Tawang dan Stasiun Rayon, yang mana terdiri dari:

- i. Stasiun Alastua (Ata);
- ii. Stasiun Brumbung (Brb);
- iii. Stasiun Gambringan (Gbn);
- iv. Stasiun Ngrombo (Nbo);
- v. Stasiun Tegowangu (Tgw)
- vi. Stasiun Gubug (Gub);
- vii. Stasiun Karangjati (Kgt);
- viii. Stasiun Sedadi (Sdi).

dan menerima pengembalian sisa Uang Muka Dinas serta menyimpan uang *petty cash*.

2) *Junior Supervisor* Pendapatan Stasiun Semarang Poncol, mengelola pendapatan Stasiun Semarang Poncol dan Stasiun Rayon, yang terdiri dari:

- i. Stasiun Gundih (Gd);
- ii. Stasiun Ambarawa (Abr);
- iii. Stasiun Tanggung (Tgg);
- iv. Stasiun Kedungjati (Kej);
- v. Stasiun Padas (Pds);
- vi. Stasiun Telawa (Tw);
- vii. Stasiun Karangsono (Kso).

3) *Junior Supervisor* Pendapatan Stasiun Tegal, mengelola pendapatan Stasiun Tegal, dan Stasiun Rayon yang terdiri dari :

- i. Stasiun Pemalang (Pml);
- ii. Stasiun Comal (Co);

- iii. Stasiun Larangan (Lr);
 - iv. Stasiun Sragi (Sri);
 - v. Stasiun Suradadi (Sd);
 - vi. Stasiun Petarukan (Pta).
- 4) *Junior Supervisor* Pendapatan Stasiun Bojonegoro, mengelola pendapatan Stasiun Bojonegoro dan Stasiun Rayon, yang terdiri dari:
- i. Stasiun Cepu (Cu);
 - ii. Stasiun Randublantung (Rbg);
 - iii. Stasiun Doplang (Dpl);
 - iv. Stasiun Kradenan(Kkn);
 - v. Stasiun Kalitidu (Kit);
 - vi. Stasiun Tobo (Tbo);
 - vii. Stasiun Kapuan (Kpa);
 - viii. Stasiun Wadu (Wdu);
 - ix. Stasiun Sulur (Sl);
 - x. Stasiun Panunggalan (Pnl);
 - xi. Stasiun Jambon (Jbn).
- 5) *Junior Supervisor* Pendapatan Stasiun Pekalongan, mengelola pendapatan Stasiun Pekalongan dan Stasiun Rayon, yang terdiri dari:
- i. Stasiun Weleri (Wlr);
 - ii. Stasiun Kalibodri (Kbd);
 - iii. Stasiun Kaliwungu (Kln)
 - iv. Stasiun Mangkang (Mkg);
 - v. Stasiun Jerakah (Jrk);
 - vi. Stasiun Batang (Btg);
 - vii. Stasiun Ujungnegoro (Ujn);
 - viii. Stasiun Krengeseng (Kns);
 - ix. Stasiun Kuripan (Krp);
 - x. Stasiun Plabuan (Plb).

- f. *Assistant Manager Pajak*, mempunyai tugas pokok dan tanggung jawab melakukan verifikasi pembayaran untuk mengidentifikasi objek pemotongan, kelengkapan tagihan dan menentukan jumlah yang dibayarkan atas Kewajiban Pemotongan: PPh Pasal 21, 23, 4 ayat 2, PPN: SPT Masa PPN 111, PPN Keluaran, PPN Masukan, PPN Masukan Tidak dapat dikreditkan, SPT Masa PPN 1107 (PUT), dan PPh Badan: Bukti Pemungutan PPh Pasal 22, Bukti Pemotongan PPh Pasal 23, Bukti Pemotongan PPh pasal 4 ayat 2; tellaah kontrak perjanjian, penyelesaian keberatan, pemeriksaan pajak dan lain-lain yang termasuk dalam hubungan dengan kantor pajak setempat.